

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan membahas hubungan antara manajemen dengan pemegang saham, di mana yang dimaksud dengan *principal* adalah pemegang saham dan *agent* adalah manajemen (Belkaoui, 2006:127). Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori keagenan adalah teori yang menghubungkan antara agen (pengelola perusahaan) dengan prinsipal (pemilik perusahaan), yang terikat dalam kontrak. *Principal* dan *agent* di perusahaan diasumsikan sebagai individu yang memiliki pengetahuan ekonomi yang rasional semata-mata termotivasi oleh kepentingan pribadi masing-masing. *Principal* sebagai pemilik modal lebih mengetahui bagaimana mereka harus mengoptimalkan modal mereka di dalam perusahaan dan menentukan arah perusahaan tersebut secara makro. Sedangkan *agent* sebagai pihak yang dipercaya dan pihak yang memiliki kemampuan untuk menjalankan perusahaan, tentu saja memiliki informasi yang lebih banyak mengenai kondisi yang sebenarnya terjadi di perusahaan. Dalam hal ini, *principal* menuntut akuntabilitas dari *agent*, namun tetap ada kemungkinan manajemen sebagai *agent* takut untuk mengungkapkan informasi yang tidak diharapkan oleh pemilik sehingga terdapat kecenderungan untuk memanipulasi laporan keuangan (Januarti, 2009).

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa teori keagenan adalah hubungan antara manajemen dan pemegang saham yang terikat dalam kontrak.

Konsep *agency theory* memandang bahwa manajemen perusahaan adalah *agent* bagi para pemegang saham. Manajemen sering bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham. Dengan munculnya perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent*, maka akan terjadi asimetri informasi, yaitu suatu keadaan di mana arus informasi antara kedua belah pihak tidak tersampaikan secara efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem pengawasan yang baik yang dapat memastikan manajemen melakukan pengelolaan perusahaan dengan tingkat kepatuhan yang tinggi. Auditor sebagai pihak ketiga yang independen dapat berfungsi sebagai mediator untuk menjembatani antara kepentingan *principal* dengan kepentingan *agent*. Auditor sebagai pihak ketiga dibutuhkan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja *agent* apakah sudah bertindak sesuai dengan kepentingan *principal* melalui laporan keuangan yang disajikan. Auditor bertugas untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan perusahaan dan mengungkapkan permasalahan *going concern* yang dihadapi oleh perusahaan bila auditor meragukan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Menurut Sari dan Zuhrotun (2006), terdapat tiga macam masalah keagenan. Pertama, masalah keagenan antara manajer dengan pemegang saham. Kedua, masalah keagenan antara pemegang saham dengan kreditor. Ketiga, masalah keagenan dengan antara perusahaan dengan konsumen.

2.1.2 Auditing

2.1.2.1 Pengertian Auditing

Auditing atau pemeriksaan menurut kamus Eric L. Kohler (1979) adalah inspeksi yang dilakukan oleh pihak ketiga atas pembukuan termasuk analisa, pengujian (test) konfirmasi dan pembuktian lainnya. Audit diartikan pula sebagai pembahasan akuntan publik yang kritis atas *internal control* yang mendasari dan pembukuan suatu perusahaan atau unit ekonomi lainnya, sebelum akuntan itu memberikan pernyataan pendapat (opini) mengenai kelayakan laporan keuangan yang diperiksanya.

Menurut RK Mautz, auditing adalah verifikasi data akuntansi untuk menentukan ketelitian dan kepercayaan atas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Secara umum, menurut Mulyadi (1998) auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa auditing adalah proses sistematis yang dilakukan pihak ketiga untuk memverifikasi bukti secara obyektif dengan tujuan memberikan kepercayaan atas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen sudah sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

2.1.2.2 Opini Auditor

Opini audit merupakan pernyataan auditor terhadap pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan auditan, dalam semua hal yang material, yang didasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan tersebut dengan prinsip akuntansi berterima umum (Mulyadi, 2009). Dalam perikatan audit terhadap laporan keuangan, seorang akuntan publik menerbitkan laporan yang berisi opini audit. Opini audit yang diberikan akuntan publik dalam laporannya didasarkan pada bukti audit yang diperoleh selama pekerjaan lapangan. Dalam pekerjaan lapangan, seorang akuntan publik melakukan berbagai prosedur audit seperti review terhadap dokumen transaksi, pemeriksaan detail transaksi, rekonsiliasi saldo-saldo laporan keuangan, perhitungan kembali terhadap biaya yang dialokasikan, pemeriksaan fisik asset, konfirmasi terhadap utang dan piutang. Opini audit adalah *output* dari prosedur-prosedur audit yang dilakukan oleh akuntan publik.

Opini audit yang diberikan atas laporan keuangan adalah opini yang menyatakan apakah laporan keuangan suatu perusahaan ataupun organisasi telah disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yaitu semua aturan-aturan akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, termasuk SAK dan prinsip-prinsip lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait pelaporan keuangan. Pendapat auditor disajikan dalam suatu laporan tertulis yang umumnya berupa laporan audit baku. Laporan audit baku terdiri dari tiga paragraf, yaitu paragraf pengantar (*introductory paragraf*), paragraf lingkup (*scope paragraf*), dan paragraf pendapat (*opinion paragraf*). Paragraf pengantar dicantumkan sebagai paragraf

pertama laporan audit baku. Terdapat tiga fakta yang diungkapkan oleh auditor dalam paragraf pengantar: (1) tipe jasa yang diberikan oleh auditor, (2) objek yang diaudit, (3) pengungkapan tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan dan tanggung jawab auditor atas pendapat yang diberikan atas laporan keuangan berdasarkan hasil auditnya. Paragraf lingkup berisi pernyataan ringkas mengenai lingkup audit yang dilaksanakan oleh auditor, dan paragraf pendapat berisi pernyataan ringkas mengenai pendapat auditor tentang kewajaran laporan keuangan auditan (Mulyadi, 2002:12). Opini audit atas laporan keuangan yang diberikan akuntan publik dapat berupa opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjasar (*unqualified opinion with explanatory language*), wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), opini tidak wajar (*adverse opinion*), dan tidak memberikan opini (*disclaimer*). Opini auditor menurut Mulyadi (2002:20-22) sebagai berikut:

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Laporan audit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian diterbitkan oleh auditor jika kondisi berikut terpenuhi:

- a. Semua laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas terdapat dalam laporan keuangan.
- b. Dalam pelaksanaan perikatan, seluruh standar umum dapat dipenuhi oleh auditor.

- c. Bukti cukup dapat dikumpulkan oleh auditor, dan auditor telah melaksanakan perikatan sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk melaksanakan tiga standar pekerjaan lapangan.
 - d. Laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum di Indonesia.
 - e. Tidak ada keadaan yang mengharuskan auditor untuk menambah paragraf penjelas atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit.
2. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelas (*Unqualified Opinion with Explanatory Language*)

Dalam keadaan tertentu, auditor menambahkan suatu paragraf penjelas atau bahasa penjelas lain dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan auditan. Paragraf penjelas dicantumkan setelah paragraf pendapat. Keadaan yang menjadi penyebab utama ditambahkannya suatu paragraf penjelas atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit baku adalah:

- a. Pendapat auditor sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lain.
- b. Untuk mencegah agar laporan keuangan tidak menyesatkan karena keadaan-keadaan yang luar biasa, laporan keuangan disajikan menyimpang dari suatu prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh IAI.
- c. Jika terdapat kondisi dan peristiwa yang semula menyebabkan auditor yakin tentang adanya kesangsian mengenai kelangsungan hidup entitas, namun setelah mempertimbangkan rencana manajemen, auditor berkesimpulan

bahwa rencana manajemen tersebut dapat secara efektif dilaksanakan dan pengungkapan mengenai hal itu telah memadai.

- d. Di antara periode akuntansi terdapat suatu perubahan material dalam penggunaan prinsip akuntansi atau dalam metode penerapannya.
- e. Keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporan auditor atas laporan keuangan komparatif.
- f. Data keuangan kuartalan tertentu yang diharuskan oleh BAPEPAM namun tidak disajikan atau di-review.
- g. Informasi tambahan yang diharuskan oleh IAI-Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah dihilangkan, yang penyajiannya menyimpang jauh dari panduan yang dikeluarkan oleh dewan tersebut, dan auditor tidak dapat melengkapi prosedur yang berkaitan dengan informasi tersebut atau auditor tidak dapat menghilangkan keragu-ragua besar apakah informasi tambahan tersebut sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh dewan tersebut.
- h. Informasi lain dalam suatu dokumen yang berisi laporan keuangan auditan secara material tidak konsisten dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

3. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Pendapat wajar dengan pengecualian diberikan apabila *auditee* menyajikan secara wajar laporan keuangan, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima secara umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal yang dikecualikan. Pendapat wajar dengan pengecualian dinyatakan dalam keadaan:

- a. Tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap ruang lingkup audit.
- b. Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, yang berdampak material, dan auditor berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat tidak wajar.

4. Pendapat Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Pendapat tidak wajar diberikan oleh auditor apabila auditor merasa yakin bahwa keseluruhan laporan keuangan yang disajikan memuat salah saji material atau menyesatkan sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan atau hasil operasi perusahaan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pendapat tidak wajar ini hanya dibuat jika auditor memiliki bahan bukti yang cukup dan melalui penyelidikan yang memadai tentang ketidaksesuaian tersebut.

5. Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer of Opinion*)

Auditor menyatakan tidak memberikan pendapat jika dia tidak melaksanakan audit yang berlingkup memadai untuk memungkinkan auditor memberikan pendapat atas laporan keuangan. Pendapat ini juga diberikan apabila dia dalam kondisi tidak independen dalam hubungannya dengan klien. Pernyataan ini diberikan apabila:

- a. Ada pembatasan lingkup audit yang sangat material baik oleh klien maupun karena kondisi tertentu.
- b. Auditor tidak independen terhadap klien.

2.1.2.3 Opini *Going Concern*

Bagi auditor eksternal, penentuan opini audit harus dikaitkan dengan penggunaan asumsi *going concern* dalam menyusun laporan keuangan. Auditor eksternal harus mengidentifikasi setiap tahap kegagalan bisnis yang telah dicapai perusahaan dalam memberikan opini audit atas laporan keuangan perusahaan yang kemampuan mempertahankan kelangsungan hidupnya diragukan. Identifikasi tersebut harus dilakukan dengan mengevaluasi bukti-bukti audit yang diperoleh selama pekerjaan lapangan dan evaluasi dilakukan dengan *judgement* pada saat menentukan opini audit apa yang akan diberikan. Berikut adalah panduan bagi auditor dalam menerbitkan opini *going concern* menurut SPAP (2011):

1. Jika auditor yakin bahwa terdapat kesangsian mengenai kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas, ia harus:
 - a. Memperoleh informasi mengenai rencana manajemen yang ditujukan untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa tersebut.
 - b. Menetapkan kemungkinan bahwa rencana tersebut secara efektif dilaksanakan.
2. Jika manajemen tidak memiliki rencana untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa terhadap kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya maka auditor mempertahankan untuk memberikan pernyataan tidak memberikan pendapat (*disclaimer opinion*).

3. Jika manajemen memiliki rencana untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa di atas, maka auditor menyimpulkan (berdasarkan pertimbangannya) atas efektivitas rencana tersebut:
 - a. Jika auditor berkesimpulan bahwa rencana tersebut tidak efektif, maka auditor menyatakan tidak memberikan pendapat (*disclaimer opinion*).
 - b. Jika auditor berkesimpulan bahwa rencana tersebut efektif dan klien mengungkapkan dalam catatan laporan keuangan, maka auditor menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjas (*unqualified opinion with explanatory language/emphasis of matter paragraph*).
4. Jika auditor berkesimpulan rencana tersebut efektif akan tetapi klien tidak mengungkapkan dalam catatan laporan keuangan, maka auditor dapat memberikan pendapat tidak wajar (*qualified/adverse opinion*).

2.1.3 Going Concern

2.1.3.1 Pengertian Going Concern

Going concern adalah kelangsungan hidup suatu badan usaha dan merupakan asumsi dalam pelaporan keuangan entitas sehingga jika entitas mengalami kondisi yang sebaliknya entitas tersebut menjadi bermasalah (Petronela 2004 dalam Rahman 2011).

Going concern yaitu perusahaan beroperasi dengan harapan berlangsung terus sehingga aktiva tidak berwujud dan depresiasi aktiva tetap dapat dilanjutkan karena dianggap masih bermanfaat di masa yang akan datang. Masalah prinsip *going concern*

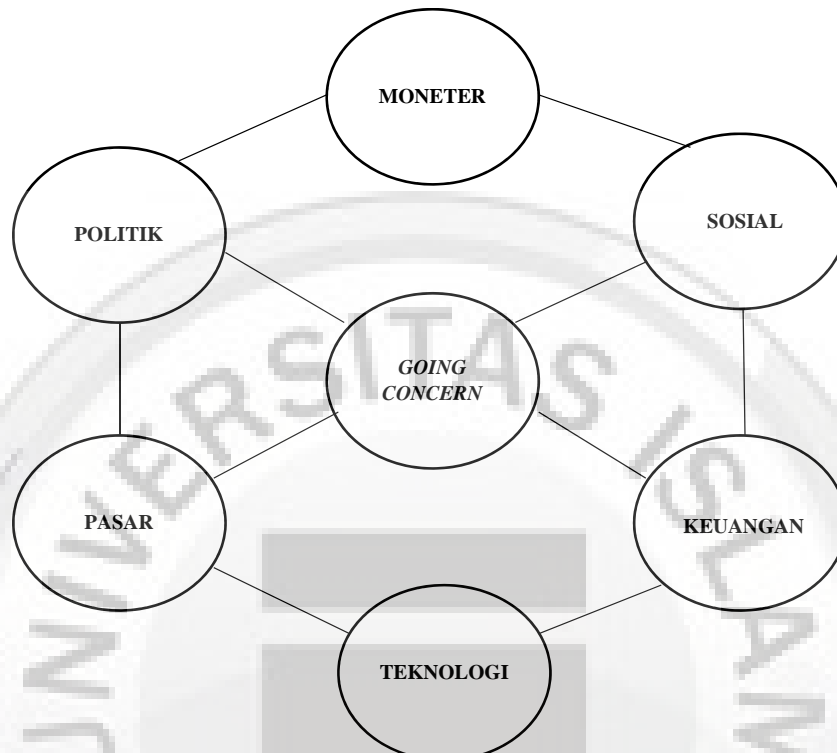
dipengaruhi oleh ketidakpastian yang sangat material yang mengancam kontinuitas (kelangsungan hidup suatu unit organisasi/perusahaan).

Accounting Principle Board (APB) no. 4 menganggap konsepsi *going concern* sebagai suatu “*basic feature*” atau gambaran dasar dari akuntansi keuangan yang ditentukan oleh karakteristik di sekitar akuntansi keuangan yang menyatakan bahwa kelangsungan operasi suatu unit organisasi dianggap ada bagi akuntansi keuangan selama tidak terdapat bukti yang sebaliknya.

Berdasarkan uraian definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *going concern* adalah kelangsungan hidup suatu usaha diharapkan akan terus berlanjut dan dianggap aktiva tidak berwujud masih memiliki manfaat di masa yang akan datang.

2.1.3.2 Pengukuran *Going Concern*

Keberlangsungan hidup entitas bisnis dipengaruhi oleh kendala internal dan eksternal. Kendala eksternal dapat berupa kendala di luar perusahaan seperti pasar, kondisi moneter, sosial, politik, dan lain-lain. Sedangkan kendala internal adalah kendala di dalam perusahaan itu sendiri seperti kondisi keuangan, sumber daya manusia, budaya perusahaan, penguasaan teknologi, pengawasan internal, dan lain-lain. Kendala eksternal dan internal tersebut dapat dijadikan indikator dalam menentukan apakah terdapat keraguan atas kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Indikator-indikator kegagalan usaha dapat dikategorikan dan saling mempengaruhi.



Gambar 2.1
Indikator Kegagalan Usaha
Sumber: Marisi P. Purba (2009)

Bagan pada gambar 2.1 menunjukkan interaksi beberapa indikator dan bagaimana ketidakpastian ekonomi berujung pada ketidakmampuan entitas bisnis mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan penjelasan seperti berikut:

a. Keuangan

Kondisi keuangan perusahaan merupakan kunci utama dalam melihat apakah perusahaan akan mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya atau tidak pada masa yang akan datang. Kondisi keuangan mencerminkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat dan pelunasan

bunga pinjaman kepada kreditur. Kondisi ini dapat dilihat dari kemampuan perusahaan dalam menciptakan kas yang berawal dari kemampuan perusahaan menciptakan laba.

b. Moneter

Perekonomian Indonesia tentu saja dipengaruhi oleh aspek yang satu ini, apalagi jika banyak bergantung kepada pinjaman luar negeri dan ekspor. Kendala moneter juga mempengaruhi ekonomi mikro apabila banyak entitas bisnis memiliki pinjaman dalam mata uang asing. Sehingga depresiasi rupiah terhadap mata uang asing secara otomatis akan mempengaruhi kemampuan entitas dalam menjaga kelangsungan hidupnya. Hal yang sama juga ditemukan pada perusahaan yang mengandalkan bahan baku impor, dimana perusahaan tersebut tidak lagi dapat menjaga kelangsungan operasi dan kesinambungan usahanya dengan biaya produksi yang tinggi.

c. Sosial

Kerawanan sosial (*social unrest*) dapat muncul sebagai dampak sampingan. Risiko kerawanan sosial yang dapat timbul dan mempengaruhi entitas seperti tingkat kriminalitas tinggi dan penyakit sosial lainnya. Peristiwa Mei 1998 adalah contoh nyata, dimana iklim investasi di Indonesia secara drastis anjlok sebagai akibat aksi anarkis penjarahan yang mengakibatkan banyaknya perusahaan yang gulung tikar. Demikian juga kondisi perburuhan suatu negara yang sering mogok dan demonstrasi akan menimbulkan ketidakpastian yang besar bagi perusahaan dalam berinvestasi.

d. Politik

Tidak bisa dipungkiri, sehat tidaknya iklim investasi pada suatu negara tergantung pada situasi politik negara tersebut. Hal ini berkaitan dengan realita bahwa

entitas berada di bawah rezim yang berkuasa sebagai pihak regulator. Ketidakmampuan pemerintah dalam menjaga kestabilan politik dan menegakkan supremasi hukum dapat mengakibatkan kondisi ekonomi dan sosial yang memburuk yang pada akhirnya mempengaruhi dunia investasi dan *going concern* entitas-entitas bisnis.

e. Pasar

Kemampuan perusahaan menguasai pasar adalah kunci keberhasilan dalam menciptakan laba. Kemampuan tersebut dipengaruhi berbagai kendala seperti daya saing, regulasi, inovasi produk, jalur distribusi, teknologi dan lain-lain. Jika entitas bisnis kehilangan pangsa pasar bagi produk-produknya, maka secara otomatis kemampuannya dalam menjaga kelangsungan hidup akan menurun.

f. Teknologi

Penguasaan teknologi dapat dipastikan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menjaga kelangsungan hidupnya. Kemampuan perusahaan sebagai entitas bisnis dalam memenangkan persaingan juga sangat dipengaruhi oleh penguasaan teknologi, tidak hanya perusahaan yang bergerak di bidang jasa, perbankan, namun juga perusahaan yang bergerak di bidang sektor riil.

Pengukuran kelangsungan hidup dan stabilitas dari aktivitas ekonomi dipengaruhi oleh faktor atau unsur seperti berikut:

1. Bentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, firma, koperasi, dan lain-lain yang menentukan berapa lama perusahaan itu didirikan.

2. Ketentuan hukum/undang-undang dan adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Semakin tertib masyarakatnya akan semakin sedikit unsur ketidakpastiannya.

SA 570 menjelaskan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan tentang asumsi kelangsungan usaha, seperti:

1. Keadaan Keuangan

1. Posisi liabilitas bersih atau liabilitas lancar bersih.
2. Pinjaman dengan waktu pengembalian tetap mendekati jatuh temponya tanpa prospek yang realistis atas pembaharuan atau pelunasan; atau pengendalian yang berlebih pada pinjaman jangka pendek untuk mendanai asset jangka panjang.
3. Indikasi penarikan dukungan keuangan oleh kreditor.
4. Arus kas operasi yang negatif, yang diindikasikan oleh laporan keuangan historis atau prospektif.
5. Rasio keuangan utama yang memburuk.
6. Kerugian operasi yang substansial atau penurunan signifikan dalam nilai asset yang digunakan untuk menghasilkan arus kas.
7. Dividen yang sudah lama terutang atau yang tidak berkelanjutan.
8. Ketidakmampuan untuk melunasi kreditur pada tanggal jatuh tempo.
9. Ketidakmampuan untuk mematuhi persyaratan perjanjian pinjaman.
10. Perubahan transaksi dengan pemask, yaitu dari transaksi kredit menjadi transaksi tunai ketika pengiriman.

11. Ketidakmampuan untuk memperoleh pendanaan untuk pengembangan produk baru yang esensial atau investasi esensial lainnya.
2. Keadaan Operasi
 1. Intensi manajemen untuk melikuidasi entitas atau untuk menghentikan operasinya.
 2. Hilangnya manajemen kunci tanpa penggantian.
 3. Hilangnya suatu pasar utama, pelanggan utama, wara laba, lisensi, atau pemasok utama.
 4. Kesulitan tenaga kerja.
 5. Kekurangan penyediaan barang/bahan.
 6. Munculnya competitor yang sangat berhasil.
 3. Lain-lain
 1. Ketidakpastian terhadap ketentuan permodalan atau ketentuan statutori lainnya.
 2. Perkara hukum yang dihadapi entitas yang jika berhasil dapat mengakibatkan tuntutan kepada entitas yang kemungkinan kecil dapat dipenuhi oleh entitas.
 3. Perubahan dalam peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang diperkirakan akan memberikan dampak buruk bagi entitas.
 4. Kerusakan asset yang diakibatkan oleh bencana alam yang tidak diasuransikan atau kurang diasuransikan.

Tanda-tanda (indikasi) atas keingkaran terhadap prinsip *going concern* adalah sebagai berikut:

1. Masalah Keuangan

Perusahaan sulit memenuhi kewajibannya akibat:

1. Kekurangan likuiditas, utang lancar lebih besar dari aktiva lancar.
2. Kekurangan modal, utang terus-menerus, utang lebih besar dari pada total aktiva.
3. Tidak mampu membayar utang yang jatuh tempo sesuai dengan perjanjian.
4. Kekurangan dana, perusahaan tidak mampu atau sangat kecil sekali kemungkinan untuk mendapat tambahan dana dari berbagai sumber pemberi modal.

2. Masalah Operasi

Masalah operasi yang jelas dari kegagalan operasinya, yaitu:

1. Terus-menerus menderita rugi operasi, tidak memperoleh laba lebih dari satu tahun buku.
2. Keraguan untuk dapat memperoleh pendapatan yang cukup di masa yang akan datang karena ternyata hasil operasi sehari-hari tidak mampu menutupi biaya rutin, kemampuan pemasaran/produksi sangat mundur sehingga terdapat pengurangan pegawai.
3. Kemampuan beroperasi dibahayakan karena adanya tuntutan hukum sehingga operasi merosot dan leveransir menolak/enggan mengadakan transaksinya dengan perusahaan.

4. Kelemahan pengendalian atas operasi perusahaan karena manajemen yang tidak baik. Pengendalian internal yang lemah dengan bukti misalnya ada kesalahan berulang-ulang tanpa diketahui sehingga tidak ada tindakan koreksi.

Standar Auditing (SA) seksi 341 paragraf 06 (PSA no. 30) menyebutkan bahwa *“Dalam pelaksanaan prosedur seperti yang disebutkan dalam paragraf 05 (prosedur audit), auditor dapat mengidentifikasi informasi mengenai kondisi atau peristiwa tertentu yang jika dipertimbangkan secara keseluruhan menunjukkan adanya kesangsian besar tentang kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu yang pantas. Signifikan atau tidaknya kondisi atau peristiwa tersebut akan tergantung keadaan, dan beberapa diantaranya kemungkinan hanya menjadi signifikan jika ditinjau bersama-sama dengan kondisi atau peristiwa yang lain”*. Berikut ini adalah contoh kondisi dan peristiwa tersebut yang disebutkan dalam SA seksi 341:

1. Trend negatif, sebagai contoh, kerugian operasi yang berulang terjadi, kekurangan modal kerja, arus kas negatif dari kegiatan usaha, rasio keuangan penting yang jelek.
2. Petunjuk lain tentang kemungkinan kesulitan keuangan, sebagai contoh, kegagalan dalam memenuhi kewajiban utang atau perjanjian serupa, penunggakan pembayaran dividen, penolakan oleh pemasok terhadap pengajuan permintaan pembelian kredit biasa, restrukturisasi utang, kebutuhan untuk mencari sumber atau metode pendanaan baru, atau penjualan sebagian besar aktiva.

3. Masalah internal, sebagai contoh, pemogokan kerja atau kesulitan hubungan perburuhan yang lain, ketergantungan besar atas sukses proyek tertentu, komitmen jangka panjang yang tidak bersifat ekonomis, kebutuhan untuk secara signifikan memperbaiki operasi.
4. Masalah luar yang terjadi, sebagai contoh, pengaduan gugatan pengadilan, keluarnya undang-undang atau masalah-masalah lain yang kemungkinan membahayakan kemampuan entitas untuk beroperasi, kehilangan *franchise*, lisensi atau paten penting, kehilangan pelanggan atau pemasok utama, kerugian akibat bencana besar, seperti gempa bumi, banjir, kekeringan, yang tidak diasuransikan atau diasuransikan namun dengan pertanggungan yang tidak memadai.

Arens dan Loebbecke (1996:52) menyatakan beberapa faktor yang menimbulkan ketidakpastian mengenai kelangsungan hidup perusahaan adalah (1) kerugian usaha yang besar secara berulang atau kekurangan modal kerja, (2) ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo dalam jangka pendek, (3) kehilangan pelanggan utama, terjadinya bencana yang tidak diasuransikan seperti gempa bumi dan banjir atau masalah perburuhan yang tidak biasa, serta (4) perkara pengadilan, gugatan hukum atau masalah serupa yang terjadi.

2.1.4 Reputasi Kantor Akuntan Publik

2.1.4.1 Kantor Akuntan Publik

Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari menteri sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya (PMK Nomor 17/PMK.01/2008). Kantor Akuntan Publik merupakan sebuah organisasi yang bergerak di bidang jasa. Jasa yang diberikan berupa jasa audit operasional, audit kepatuhan, dan audit laporan keuangan (Arens, 2006).

Pemberian izin usaha Kantor Akuntan Publik dan cabang Kantor Akuntan Publik yang diatur dalam Undang-Undang Akuntan Publik merupakan kewenangan Menteri Keuangan. Berdasarkan pasal 18 ayat 2 UU Akuntan Publik, syarat untuk mendapatkan izin usaha Kantor Akuntan Publik adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai kantor atau tempat usaha yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Memiliki NPWP badan untuk Kantor Akuntan Publik yang berbentuk usaha persekutuan perdata dan firma atau NPWP pribadi untuk Kantor Akuntan Publik yang berbentuk usaha perseorangan.
3. Mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang tenaga professional pemeriksa di bidang akuntansi.
4. Memiliki rancangan sistem pengendalian mutu.
5. Membuat surat pernyataan terkait dengan maksud dan tujuan pendirian kantor dengan bermaterai cukup bagi usaha perseorangan.

6. Memiliki akta pendirian yang dibuat oleh dan di hadapan notaris bagi bentuk usaha persekutuan perdata, firma dan bentuk lain yang diatur dalam undang-undang.

2.1.4.2 Wewenang dan Tugas Akuntan Publik

Pimpinan tertinggi kantor akuntan publik disebut partner atau kepala kantor. Perundingan penugasan pemeriksaan dengan klien/calon klien biasanya melalui partner. Partner memilih staff, memimpin, dan melatih staff saat menentukan *policy* kantor akuntan publik. Semua laporan pemeriksaan harus disetujui oleh partner. Partner harus memelihara hubungan baik dengan klien dan membicarakan dengan klien mengenai masalah yang sangat penting yang dijumpai dari hasil pemeriksaan.

Dibawah partner terdapat manajer dan/atau supervisor. Manajer dan/atau supervisor bertanggung jawab kepada partner dalam melaksanakan berbagai tugas administratif, menjadi penghubung antara staff dengan partner, mengawasi para akuntan senior, mereviu kertas kerja pemeriksaan dan konsep laporan pemeriksaan, membicarakan hal-hal penting dengan pimpinan perusahaan yang diperiksa serta mendidik dan membina para staff.

Akuntan senior harus pandai memimpin, mengkoordinir dan mengawasi para pelaksana/bawahan, cakap dan dapat melakukan tugas pemeriksaan yang sulit karena akuntan senior adalah ketua tim pemeriksaan. Akuntan senior harus melakukan evaluasi *internal control* dan menyusun program pemeriksaan, menyusun anggaran waktu pemeriksaan, mengawasi dan membina akuntan semi senior dan staff/asisten akuntan, mereviu kertas kerja pemeriksaan, mempelajari hal-hal penting mengenai

keputusan rapat direksi, susunan modal, penilaian aktiva, resitansi pajak, dan yang lainnya.

Akuntan semi senior harus bisa menganalisa, menghubungkan berbagai hal yang dijumpai dalam pemeriksaan, memimpin dan mengarahkan pemeriksaan kepada para akuntan junior.

Akuntan junior harus dapat melaksanakan pekerjaan pemeriksaan yang detail yaitu memverifikasi, menjumlahkan, mengalikan, dan membukukan koreksi, mengikuti jalannya pembukuan, mencocokkan pembukuan dengan buktinya, membuat daftar lampiran, dan merekonsiliasi saldo yang satu dengan yang lain.

2.1.4.3 Reputasi Kantor Akuntan Publik

Kantor akuntan publik besar identik dengan kantor akuntan publik yang memiliki reputasi tinggi atau kantor akuntan publik internasional. Dapat dikatakan bahwa investor mempersepsikan auditor yang berasal dari *big four* atau yang berafiliasi dengan kantor akuntan publik internasional memiliki kualitas yang lebih tinggi karena auditor tersebut memiliki karakteristik-karakteristik yang bisa dikaitkan dengan kualitas, seperti pelatihan dan pengakuan internasional. Ketika kantor akuntan publik mengklaim dirinya sebagai kantor akuntan publik bereputasi baik seperti *big four* maka mereka berusaha keras untuk menjaga nama baik dan menghindari tindakan-tindakan yang mengganggu nama baik kantor akuntan publik tersebut.

Standar umum yang berkaitan dengan kualifikasi auditor yang berkualitas dan mutu pekerjaan auditor menurut Boyton (2001:61) adalah sebagai berikut:

1. Keahlian dan Pelatihan Teknis yang Memadai

Dalam setiap profesi, terdapat sesuatu yang sangat berharga pada kompetensi teknis. Kompetensi auditor ditentukan oleh tiga faktor, yaitu pendidikan formal, pelatihan praktik dan pengalaman dalam auditing dan mengikuti pendidikan profesi yang berkelanjutan selama karir professional auditor.

2. Independensi dalam Sikap Mental

Auditor harus bebas dari pengaruh klien dalam melaksanakan audit serta dalam melaporkan temuan-temuannya. Auditor juga harus memenuhi persyaratan independensi dalam kode etik professional.

3. Penggunaan Kemahiran Profesional

Auditor diharapkan memiliki kesungguhan dan kecermatan dalam melaksanakan audit serta menerbitkan laporan atas temuan. Dalam memenuhi standar ini, seorang auditor yang berpengalaman harus secara kritis melakukan *review* atas pekerjaan yang dikerjakan oleh personil kurang berpengalaman yang turut mengambil bagian dalam standar. Standar penggunaan kemahiran ini mengharuskan seorang auditor berlaku jujur dan tidak ceroboh dalam melakukan audit.

4. Perencanaan dan Supervisi yang Memadai

Agar suatu audit dapat dikatakan efektif dan efisien, maka audit harus direncanakan dengan baik. Perencanaan meliputi pengembangan strategi audit serta rancangan program audit yang akan digunakan dalam melaksanakan audit. Supervisi yang benar merupakan hal yang terpenting karena seringkali sebagian

besar pelaksanaan program audit dilaksanakan oleh asisten staff dengan pengalaman yang terbatas.

5. Pemahaman atas Struktur Pengendalian Intern

Struktur pengendalian internal klien merupakan faktor yang penting dalam suatu audit. Struktur pengendalian internal yang dirancang dengan baik dan efektif akan mampu melindungi asset klien dan menghasilkan informasi keuangan yang andal.

6. Mendapatkan Cukup Bukti Audit Kompeten yang Cukup

Tujuan akhir standar pekerjaan lapangan adalah menyediakan dasar yang memadai bagi auditor untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan klien. Untuk memenuhi standar ini diperlukan penggunaan pertimbangan professional dalam menentukan jumlah dan mutu bukti audit yang diperlukan untuk mendukung pendapat auditor.

Untuk meningkatkan kredibilitas dari laporan keuangan, perusahaan menggunakan jasa kantor akuntan publik yang mempunyai reputasi atau nama baik. Hal ini ditunjukkan dengan kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan kantor akuntan publik besar yang berlaku universal yang dikenal dengan *big four*. Kategori kantor akuntan publik *big four* di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Ernst & Young berafiliasi dengan KAP Purwantono, Suherman dan Surja.
2. Deloitte Touche Tohmatsu berafiliasi dengan KAP Osman Bing Satrio.
3. KPMG berafiliasi dengan KAP Sidharta dan Widjaja.
4. Price Waterhouse Coopers berafiliasi dengan KAP Tanudiredja, Wibisana dan Rekan.

2.1.5 Pertumbuhan Perusahaan

Pertumbuhan perusahaan merupakan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan *size* (Kallapur dan Trombley, 2001). Menurut Taswan (2003) pertumbuhan dinyatakan sebagai pertumbuhan total asset dimana pertumbuhan asset masa lalu akan menggambarkan profitabilitas yang akan datang dan pertumbuhan yang datang. Pertumbuhan perusahaan mengindikasikan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Pertumbuhan perusahaan pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor eksternal, internal dan pengaruh iklim industri lokal.

Pertumbuhan perusahaan yang cepat maka semakin besar kebutuhan dana untuk ekspansi. Semakin besar kebutuhan untuk pembiayaan mendatang maka semakin besar keinginan perusahaan untuk menahan laba. Jadi perusahaan yang sedang tumbuh sebaiknya tidak membagikan laba sebagai dividen tetapi lebih baik digunakan untuk ekspansi. Potensi pertumbuhan ini dapat diukur dari besarnya biaya penelitian dan pengembangan. Semakin besar R&D *cost*-nya maka akan ada prospek perusahaan untuk tumbuh (Sartono, 2001). Sedangkan perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, dalam hubungannya dengan *leverage*, sebaiknya menggunakan ekuitas sebagai sumber pembiayaannya agar tidak terjadi biaya keagenan antara pemegang saham dengan manajemen perusahaan, dan bagi perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang rendah sebaiknya menggunakan hutang sebagai sumber pembiayaannya karena penggunaan hutang akan mengharuskan perusahaan tersebut membayar bunga secara teratur.

Pertumbuhan perusahaan dapat diukur dengan beberapa cara, misalnya dengan melihat pertumbuhan penjualannya. Pengukuran ini hanya dapat melihat pertumbuhan perusahaan dari aspek pemasaran perusahaan saja. Pengukuran yang lain adalah dengan melihat pertumbuhan laba operasi perusahaan. Dengan melakukan pengukuran laba operasi perusahaan, kita dapat melihat aspek pemasaran dan juga efisiensi perusahaan dalam pemanfaatan sumber daya yang dimilikinya. Pengukuran berikutnya adalah dengan mengukur pertumbuhan laba bersih, dimana inputnya pertumbuhan laba bersih ini adalah modal, sedangkan outputnya adalah laba. Pengukuran pertumbuhan perusahaan yang terakhir adalah melalui pengukuran pertumbuhan modal sendiri.

Perbandingan yang tepat atas pendapatan dan biaya tergambar dalam laporan rugi laba. Penyajian laba melalui laporan tersebut merupakan focus kinerja perusahaan yang penting. Kinerja perusahaan merupakan hasil dari serangkaian proses dengan mengorbankan berbagai sumber daya. Adapun salah satu parameter penilaian kinerja perusahaan tersebut adalah pertumbuhan laba. Pertumbuhan laba dihitung dengan cara mengurangkan laba periode sekarang dengan laba periode sebelumnya kemudian dibagi dengan laba pada periode sebelumnya. Pertumbuhan penjualan dihitung menggunakan selisih penjualan perusahaan pada periode sekarang dengan periode sebelumnya kemudian dibagi dengan penjualan perusahaan pada periode sebelumnya. Sedangkan untuk menghitung pertumbuhan modal sendiri dapat menggunakan perbandingan hutang jangka panjang dengan modal sendiri.

2.2 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu akan diuraikan mengenai hasil-hasil penelitian yang didapat oleh peneliti terdahulu dengan penelitian yang dilakukan. Beberapa penelitian tersebut antara lain adalah penelitian oleh

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Perbedaan	Kesimpulan
1	Monica Krissindiastuti dan Ni Ketut Rasmini (2016)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Opini Audit <i>Going Concern</i>	Penelitian terdahulu dilakukan pada perusahaan manufaktur sedangkan penelitian ini dilakukan pada perusahaan pertambangan.	Variabel reputasi KAP dan <i>opinion shopping</i> berpengaruh positif pada opini audit <i>going concern</i> .
2	Endra Ulkri Arma (2013)	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Opini Audit <i>Going Concern</i>	Penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel reputasi KAP	Pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap opini audit <i>going concern</i> .
3	Meliyanti Yosephine Surbakti (2011)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Opini Audit <i>Going Concern</i>	Penelitian terdahulu tidak menyebutkan variabel pertumbuhan perusahaan dan penelitian terdahulu dilakukan pada perusahaan manufaktur	Semakin besar skala auditor (KAP yang berafiliasi dengan <i>big four</i>) maka semakin besar kemungkinan perusahaan menerima opini audit <i>going concern</i> .
4	Risti Yuanda Putri (2011)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Opini Audit <i>Going Concern</i>	Penelitian terdahulu dilakukan pada perusahaan manufaktur dan tidak terdapat variabel reputasi KAP	Opini audit tahun sebelumnya, pertumbuhan perusahaan, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap opini <i>going concern</i> .
5	Kemala Sari (2012)	Analisis Pengaruh Audit Tenure, Reputasi KAP, Disclosure, Ukuran Perusahaan dan Likuiditas Terhadap	Penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel pertumbuhan perusahaan dan dilakukan pada	Audit tenure, reputasi KAP dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i> .

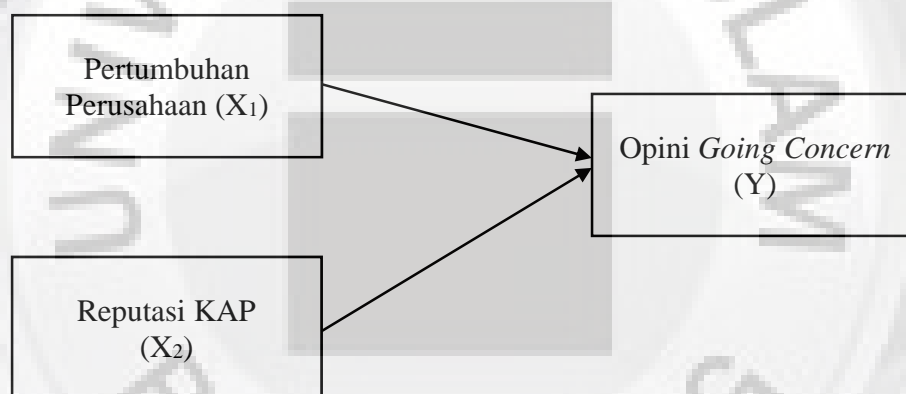
		Penerimaan Opini <i>Going Concern</i>	perusahaan manufaktur	
6	Ira Kristiana (2012)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Likuiditas, Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Opini <i>Going Concern</i> Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI	Penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel reputasi KAP dan dilakukan pada perusahaan manufaktur	Likuiditas dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap opini <i>going concern</i>
7	Abdul Rahman dan Baldric Siregar (2011)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Penerimaan Opini Audit <i>Going Concern</i> Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdapat di BEI	Penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel reputasi KAP dan dilakukan pada perusahaan manufaktur	Opini audit tahun sebelumnya, pertumbuhan perusahaan dan <i>debt to equity ratio</i> berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i>
8	Dian Elmawati (2014)	Pengaruh Reputasi KAP, <i>Audit Tenure</i> , dan <i>Disclosure</i> Terhadap Penerimaan Opini Audit <i>Going Concern</i>	Penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel pertumbuhan perusahaan dan dilakukan pada perusahaan manufaktur	Reputasi KAP berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i>

Sumber: Data diolah (2016)

2.3 Kerangka Pemikiran

Penerbitan keputusan *going concern* disebabkan adanya faktor internal dan eksternal, dimana faktor internalnya adalah *financial distress*, yaitu suatu situasi dimana arus kas operasi perusahaan tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban lancarnya dan perusahaan dipaksa untuk mengambil suatu langkah perbaikan. Faktor internal lain seperti *trend negative* dimana perusahaan mengalami kerugian operasi, kekurangan modal kerja, dan arus kas negatif dari kegiatan usaha perusahaan sehingga pertumbuhan perusahaan terhambat. Masalah internal lain dapat berhubungan dengan

tenaga kerja, seperti pemogokan kerja karyawan serta komitmen jangka panjang karyawan yang kurang. Faktor eksternal lebih kepada hal-hal lain dari luar perusahaan yang berhubungan dengan kelangsungan usaha perusahaan. Reputasi kantor akuntan publik pun menjadi salah satu hal yang dianggap memiliki pengaruh terhadap opini audit *going concern*. Kantor akuntan publik dengan reputasi *big four* dianggap memiliki independensi dan kualitas audit yang lebih baik daripada kantor akuntan publik dengan reputasi *non big four*.



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan terhadap Penerimaan Opini *Going Concern*

Pertumbuhan perusahaan mengindikasikan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Perusahaan dengan pertumbuhan yang baik akan mampu meningkatkan volume penjualannya dibandingkan dengan tahun-tahun

sebelumnya. Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonominya sehingga memberikan peluang kepada perusahaan dalam meningkatkan laba dan mempertahankan kelangsungan hidup usahanya.

Pertumbuhan asset perusahaan menunjukkan pertumbuhan kekuatan perusahaan dalam industri dan mengindikasikan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Perusahaan dengan pertumbuhan negatif mengindikasikan kecenderungan yang lebih besar ke arah kebangkrutan.

H1 : Pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap penerimaan opini *going concern*

2.4.2 Pengaruh Reputasi Kantor Akuntan Publik terhadap Penerimaan Opini

Going Concern

Reputasi KAP adalah faktor yang dapat meningkatkan kepercayaan publik serta independensi auditor. Lennox dalam Inggy (2012) menyatakan bahwa auditor yang memiliki reputasi dapat memberikan kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan auditor yang tidak memiliki reputasi, termasuk dalam pengungkapan masalah *going concern*. Kantor akuntan publik besar akan mempertahankan independensi untuk melindungi reputasi, sehingga dapat memberikan kualitas audit yang baik. Untuk mempertahankan independensinya maka auditor cenderung memberikan opini audit *going concern* jika memang terdapat ketidakpastian mengenai keberlangsungan hidup perusahaan. Karena jika auditor tidak memberikan opini audit *going concern* saat perusahaan tidak memiliki kepastian dalam keberlangsungan hidup usahanya, maka hal itu dapat mengancam reputasi mereka. Klien biasanya memiliki persepsi bahwa KAP

besar dan yang berafiliasi dengan KAP internasional seharusnya memiliki kualitas audit yang lebih tinggi.

H2 : Reputasi KAP berpengaruh terhadap penerimaan opini *going concern*

